



Determinan Ketimpangan Pendapatan Dengan *Corruption Perception Index* Sebagai Variabel Moderasi Di Negara ASEAN

Catur Novianti

Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 10 01 2026 | Revisi: 20 05 2026 | Disetujui: 28 05 2026 | Diterbitkan: 28 05 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Gross Domestic Product (GDP), Foreign Direct Investment (FDI), unemployment, and inflation on income inequality with the Corruption Perception Index (CPI) as a moderating variable in ASEAN countries. Using a quantitative approach, this research employs panel data from eight ASEAN countries for the period 2011–2023 and applies Moderated Regression Analysis (MRA). The findings reveal that CPI significantly moderates the relationship between GDP and inflation on income inequality as a pure moderator, but does not moderate the effect of FDI and unemployment. Partially, GDP and FDI show no significant effect on income inequality, while unemployment has a positive significant effect and inflation has a negative significant effect. These results highlight that governance quality plays a crucial role in strengthening the effectiveness of economic policies in reducing income inequality. The study implies that improving institutional quality is essential to achieving inclusive development in the ASEAN region.

Keywords: CPI; GDP; FDI; Income Inequality; Inflation,; Unemployment

ABSTRAK (untuk artikel berbahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Gross Domestic Product (GDP), Foreign Direct Investment (FDI), pengangguran, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan dengan Corruption Perception Index (CPI) sebagai variabel moderasi di negara-negara ASEAN. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data panel dari delapan negara ASEAN periode 2011–2023, dan dianalisis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CPI memoderasi pengaruh GDP dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan sebagai pure moderator, namun tidak memoderasi hubungan FDI dan pengangguran. Secara parsial, GDP dan FDI tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, sementara pengangguran berpengaruh positif signifikan dan inflasi berpengaruh negatif signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan berperan penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kualitas institusi merupakan faktor kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif di kawasan ASEAN.

Kata kunci : CPI; GDP; FDI; Inflasi; Ketimpangan Pendapatan; Pengangguran

How to cite:

Catur Novianti (2026). Determinan Ketimpangan Pendapatan Dengan Corruption Perception Index Sebagai Variabel Moderasi Di Negara ASEAN *Journal of Economics Development Issues*, Vol 9(no.1), pp 89 - 98. <https://doi.org/10.33005/jedi.v9i1.456>.



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang pesat ditandai dengan meningkatnya *Gross Domestic Product* (GDP), meningkatnya arus investasi asing langsung (FDI), serta berkembangnya berbagai sektor ekonomi strategis, namun kemajuan ekonomi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat (Nguyen, 2023; Ramadhanty et al., 2024). Ketimpangan pendapatan masih menjadi isu struktural yang terus membayangi kawasan ini. Fenomena tersebut tercermin dari tingkat gini coefficient negara-negara ASEAN yang masih relatif tinggi, seperti Malaysia sebesar sekitar 0,41, Filipina 0,42, dan Thailand 0,43, sementara Indonesia berada pada angka sekitar 0,38. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat belum merata dan terdapat jurang kesejahteraan yang masih signifikan di wilayah ASEAN. Penelitian menggunakan data panel dari delapan negara ASEAN, pemilihan delapan negara dengan alasan karena hanya delapan negara ini yang memiliki data lengkap dari seluruh variabel yang digunakan selama masa pengamatan.

Secara teoritis, ketimpangan pendapatan dijelaskan melalui berbagai pendekatan. Menurut (Kuznets, 1995). Teori klasik seperti *Kuznets Hypothesis* menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, namun akan menurun ketika suatu negara telah mencapai tahap kematangan industri. Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan indikator Gini Index yang mencerminkan sejauh mana distribusi pendapatan menyimpang dari distribusi yang merata, salah satunya yang terjadi di negara ASEAN.

Permasalahan ketimpangan pendapatan di ASEAN dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi dan institusional. Peningkatan GDP belum sepenuhnya bersifat inklusif, karena output pertumbuhan kerap lebih dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi atau sektor padat modal. Arus masuk FDI yang cukup besar ke negara-negara ASEAN tidak selalu membawa pemerataan, terutama ketika investasi terpusat pada sektor-sektor tertentu atau terkonsentrasi di wilayah perkotaan sehingga memperlebar perbedaan pendapatan antar wilayah (Abdi et al., 2025). Selain itu, tingkat pengangguran yang masih menjadi permasalahan di beberapa negara ASEAN berkontribusi pada rendahnya daya beli dan terbatasnya mobilitas ekonomi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga memicu ketimpangan pendapatan. Sementara itu, inflasi berpotensi memperburuk kondisi ketimpangan karena masyarakat berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok (Kunawotor et al., 2020; Wairooy & Slamet Haryono, 2023). Inflasi berdampak negatif artinya inflasi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat (Anugrah et al., 2025). Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh tingkat korupsi yang masih menjadi tantangan di sebagian negara ASEAN, tercermin dari skor *Corruption Perception Index* (CPI) yang bervariasi dan menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya efektif dalam memastikan distribusi kesejahteraan yang merata.

Hubungan antar variabel GDP, FDI, pengangguran, inflasi, dan ketimpangan pendapatan secara teoritis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi asing seharusnya mampu menurunkan ketimpangan apabila manfaatnya tersebar luas, namun, hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan (Hu, 2021). Korupsi yang tinggi dapat melemahkan dampak positif pertumbuhan dan investasi melalui kebocoran anggaran, praktik rente, serta distribusi sumber daya yang tidak merata (Kundu, 2024). Sebaliknya, CPI yang tinggi menunjukkan rendahnya korupsi, yang berpotensi memperkuat efek positif GDP dan FDI serta menekan dampak negatif inflasi dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, CPI dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang menentukan arah dan kekuatan hubungan variabel-variabel makroekonomi tersebut terhadap ketimpangan pendapatan.

Berbagai studi menjelaskan hubungan negatif signifikan antara GDP, FDI terhadap ketimpangan pendapatan, dalam jangka panjang mendorong masuk arus FDI menyebabkan pengurangan ketimpangan

pendapatan Ravinthirakumaran & Ravinthirakumaran (2018). FDI, Pengangguran berpengaruh positif signifikan, meningkatnya pengangguran akan meningkatkan ketimpangan pendapatan karena tunjangan pengangguran seringkali lebih rendah, sedangkan inflasi berpengaruh negatif signifikan, inflasi yang tinggi cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan karena harga barang naik lebih cepat daripada pendapatan Gam et al., (2023).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji determinan ketimpangan pendapatan, sebagian besar studi masih berfokus pada hubungan langsung antara GDP, FDI, pengangguran, atau inflasi terhadap ketimpangan tanpa memasukkan kualitas institusi sebagai faktor moderasi. Penelitian yang memasukkan CPI sebagai variabel moderasi dalam hubungan variabel ekonomi makro terhadap ketimpangan pendapatan masih terbatas, khususnya dalam konteks negara-negara ASEAN yang memiliki karakteristik ekonomi dan tata kelola yang sangat beragam. Di samping itu, peneliti juga akan menganalisis interaksi variabel lainnya *Corruption Perception Index*.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena ketimpangan pendapatan menjadi tantangan kritis bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif di ASEAN. Temuan empiris dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur terkait peran tata kelola pemerintahan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah negara-negara ASEAN untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan arus investasi dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung perbaikan kualitas pembangunan di kawasan.

KAJIAN LITERATUR

Teori kurva Kuznets yang dikemukakan oleh Simon (Kuznets, 1995) menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berbentuk kurva U-terbalik (*inverted U-curve*). Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan meningkat, karena industrialisasi mendorong urbanisasi, perpindahan tenaga kerja dari sektor rendah produktivitas ke sektor tinggi produktivitas, dan distribusi modal yang tidak merata, namun pada tahap pembangunan yang lebih tinggi, ketimpangan mulai **menurun**, akibat meluasnya akses pendidikan, peningkatan upah pekerja, ekspansi kelas menengah, dan kebijakan redistribusi yang lebih efektif.

Teori ini menegaskan bahwa ketimpangan berasal dari proses transformasi struktural yang tidak merata antarindividu, sektor, maupun wilayah. Oleh karena itu, teori Kuznets sering dijadikan dasar untuk memahami dinamika hubungan variabel makro dengan ketimpangan pendapatan. pertumbuhan GDP ebih banyak dinikmati kelompok pemilik modal dan pekerja terampil, sehingga ketimpangan meningkat, namun fase pembangunan lanjut pertumbuhan GDP dapat menurunkan ketimpangan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup. Pada tahap awal industrialisasi, FDI biasanya masuk ke sektor padat modal, meningkatkan keuntungan pemilik perusahaan tetapi tidak merata ke seluruh tenaga kerja ketimpangan meningkat. Ketika transformasi struktural terjadi secara cepat, sehingga meningkatkan pengangguran, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *World Bank* sebagai sumber data. Data tersebut antara lain *Gross Domestic Bruto*

(GDP), *Foreign Direct Investment* (FDI), Pengangguran, Inflasi dan *Corruption Perception Index* (CPI) di negara ASEAN daritahun 2011 sampai 2023.

Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional	Sumber
Dependen	Ketimpangan	Gini = A/(A+B) (rasio luas kurva Lorenz)	Word Bank
	Pendapatan		
Independen	GDP Per Capita	$GDP = \frac{GDP\ Total}{Total\ Populasi}$	Word Bank
	FDI	$GDP = \frac{FDI\ Inflows}{GDP} \times 100\%$	Word Bank
	Pengangguran	$UNEMP = \frac{Jumlah\ Pengangguran}{Angkatan\ Kerja}$	Word Bank
	Inflasi	Inflation $= \frac{IHK - IHK\ periode\ n - 1}{IHK\ Periode\ n - 1} \times 100\%$	Word Bank
	CPI	Scoe 0 – 100	Transparency International (IT)

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan data panel untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Widarjono, 2018). Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$GINI_{it} = \beta_0 + \beta_1GDP_{it} + \beta_2GDP^2_{it} + \beta_3FDI_{it} + \beta_4UMPL_{it} + \beta_4INFLASI_{it} + \beta_5CPI_{it} + U_i + \epsilon_{it}$$

Terdapat tiga model yang digunakan dalam konteks regresi data panel: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pendekatan CEM adalah pendekatan yang tidak memperhitungkan pengaruh cross section dan time series. Sebaliknya, FEM beroperasi dengan asumsi bahwa koefisien slope tetap konstan, sementara koefisien intersep bervariasi untuk setiap individu. Sebaliknya, REM mempertimbangkan adanya error term yang bervariasi menurut waktu, yang dapat diatasi melalui pendekatan model komponen error. Pemilihan model yang paling tepat ditentukan dengan melakukan uji pemilihan model, yang meliputi uji Chow untuk memilih antara CEM dan FEM, uji Hausman untuk memilih antara REM dan FEM, dan *Uji Lagrange Multiplier* (LM) untuk memilih antara CEM dan REM. Setelah pemilihan model, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji F dan uji t digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F, yang sering disebut sebagai uji simultan atau uji model/ANOVA, digunakan untuk menilai pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan dengan tingkat signifikansi alpha 0,05 (5%). Jika nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel, variabel-variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sementara itu, uji t adalah uji parsial yang mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual, juga dengan tingkat

signifikansi alpha 0,05 (5%). Jika nilai thitung lebih besar dari ttabel, maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Descriptive Statistic

	GDP	FDI	UN	INF	GINI	CPI
Mean	11.61983	6.304510	2.782269	3.012581	38.66962	45.39744
Median	11.57089	2.902079	3.130000	2.824506	39.50000	37.00000
Max.	12.13709	33.30458	5.153000	18.67773	46.50000	87.00000
Min.	11.23703	-0.857990	0.249000	-1.610680	3.830000	24.00000
S.Dev.	0.202552	8.344746	1.309504	2.812691	4.878651	18.61318
Obs.	78	78	78	78	78	78

Sumber: Eviews Data diolah

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 2, variabel-variabel penelitian menunjukkan tingkat keragaman yang cukup bervariasi antarnegara ASEAN selama periode observasi. Variabel **GDP** memiliki nilai rata-rata 11.61 dengan standar deviasi 0.20, menunjukkan variasi yang relatif stabil antarnegara dan waktu. Sebaliknya, FDI memperlihatkan tingkat variasi yang tinggi dengan standar deviasi 8.34 dan rentang nilai yang luas (-0.85 hingga 33.30), mengindikasikan bahwa arus investasi asing di negara-negara ASEAN sangat fluktuatif. Variabel pengangguran memiliki rata-rata 2.78 namun dengan variasi yang cukup besar standar deviasi 1.30, menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengangguran yang signifikan antarnegara.

Selanjutnya, inflasi memiliki rata-rata 3.01 dan rentang nilai antara -1.61 hingga 18.67, menggambarkan dinamika kondisi harga yang bervariasi. Variabel ketimpangan pendapatan rata-rata berada pada angka 38.66, menunjukkan tingkat ketimpangan moderat secara umum. Adapun CPI sebagai indikator tata kelola pemerintahan memiliki nilai rata-rata 45.39 dengan rentang 24 hingga 87, yang menandakan perbedaan kualitas tata kelola antarnegara yang cukup signifikan. Dengan jumlah observasi sebanyak 78 untuk setiap variabel, data ini mencerminkan kondisi yang representatif untuk analisis regresi panel selanjutnya.

Tabel 3 Uji Chow

Uji Chow			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.170649	(5,67)	0.0125
Cross-section Chi-square	16.565508	5	0.0054

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai Probabilitas Cross-section F = 0.0000 **dan** Probabilitas Chi-square = 0.0054, yang keduanya lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model*. Dengan demikian, analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model*, karena setiap negara ASEAN memiliki karakteristik yang berbeda dan hal tersebut perlu ditangkap oleh model.

Tabel 4. Uji Hausman

Uji Hausman			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.853246	5	0.0073

Berdasarkan kriteria dari pengujian Hausman test menunjukkan nilai profitabilitas *cross section random* sebesar $0.0073 < 0,05$. Sehingga model yang yang digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Tabel. 5 Uji T

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	71.76137	26.67112	2.690602	0.0089
GDP	-3.038087	2.277149	-1.334163	0.1864
FDI	-0.104103	0.129630	-0.803074	0.4246
UNEMP	2.142117	0.389738	5.496307	0.0000
INF	-0.885129	0.158051	-5.600257	0.0000
CPI	-0.009402	0.063366	-0.148369	0.8825

Hasil Moderated Regression Analysis (MRA) data panel

Tabel 6. Hasil Uji MRA Data Panel

Model	Coefficient	Prob	Keterangan
GDPCPI	-0.668820	0.0187	Pure Moderator
FDICPI	-0.001088	0.9397	Tidak Memoderasi
UNEMCPI	-3.18E-07	0.9689	Tidak memoderasi
INFLASICPI	0.027525	0.0004	Pure Moderator

Tabel 6 menunjukkan hasil Moderated Regression Analysis (MRA) yang menguji peran *Corruption Perception Index (CPI)* sebagai variabel moderasi pada hubungan antara GDP, FDI, pengangguran, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di negara-negara ASEAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang dimoderasi secara signifikan oleh CPI, yaitu GDP dan inflasi. Interaksi GDPCPI memiliki nilai probabilitas 0.0187 (< 0.05) dengan koefisien negatif, sehingga CPI dinyatakan berperan sebagai pure moderator yang memperkuat pengaruh negatif GDP terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, ketika tingkat korupsi menurun (CPI meningkat), pertumbuhan ekonomi lebih efektif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan.

Selanjutnya, interaksi InflasiCPI juga menunjukkan signifikansi dengan nilai probabilitas 0.0004, dengan arah koefisien positif. Temuan ini menegaskan bahwa CPI merupakan pure moderator pada hubungan inflasi–ketimpangan, yang berarti tata kelola pemerintahan berperan penting dalam menentukan dampak inflasi terhadap ketimpangan pendapatan. Ketika tata kelola membaik, efek redistributif inflasi semakin kuat dalam menurunkan ketimpangan pendapatan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, namun tidak signifikan secara statistik. Secara teori, hubungan negatif ini sejalan dengan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pemerataan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan output nasional, sebagaimana dijelaskan oleh teori trickle-down effect. Namun ketidaksignifikanan ini justru mendukung pandangan Simon (Kuznets, 1995) melalui *Kuznets Curve*, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal justru tidak selalu berdampak pada penurunan ketimpangan karena manfaat pertumbuhan cenderung dinikmati kelompok berpendapatan tinggi terlebih dahulu. Ketidaksignifikanan ini juga dapat dijelaskan oleh kondisi negara ASEAN yang memiliki struktur ekonomi berbeda, sehingga pertumbuhan ekonomi belum mampu secara konsisten mengurangi ketimpangan pendapatan di negara ASEAN. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Muslikhah & Utami, 2019) pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa FDI memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, namun tidak signifikan. Secara teori, hasil ini dapat dikaitkan dengan pandangan *neoclassical growth theory*, yang menyatakan bahwa arus FDI dapat mendorong pembangunan industri, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi sehingga menurunkan ketimpangan. Namun ketidaksignifikanan dalam penelitian ini dapat dipahami melalui teori *dependency* yang menyatakan bahwa FDI dapat memperkuat dominasi kelompok pemilik modal dan memperlebar ketimpangan, terutama jika FDI terkonsentrasi pada sektor padat modal dan dinikmati perusahaan asing. Penelitian ini sejalan dengan Sapriyadi et al. (2024) ketidaksignifikanan FDI dalam konteks negara-negara ASEAN dapat terjadi karena distribusi manfaat FDI tidak merata, sebagian besar terserap di sektor-sektor tertentu, dan tidak langsung dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Variabel pengangguran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi tenaga kerja dan teori kemiskinan struktural yang menyatakan bahwa peningkatan pengangguran mengurangi pendapatan rumah tangga, mempersempit kesempatan ekonomi, dan pada akhirnya memperbesar kesenjangan antara kelompok produktif dan non-produktif. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Belay, 2022; Şenol, 2023; Zandi, 2022) yang menegaskan bahwa tingginya pengangguran memperburuk distribusi pendapatan. Di sisi lain, teori *compensating wage differentials* berargumen bahwa pasar tenaga kerja dapat menyesuaikan melalui perubahan upah, namun dalam praktik negara berkembang seperti ASEAN, mekanisme pasar tidak berjalan sempurna sehingga pengangguran tetap meningkatkan ketimpangan. memperlebar perbedaan pendapatan antar wilayah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdi et al., (2025) pengangguran dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti peningkatan inflasi justru menurunkan ketimpangan. Secara teori, hasil ini bertentangan dengan *classical inflation-inequality theory* yang menyatakan bahwa inflasi cenderung memperbesar ketimpangan karena beban inflasi lebih berat ditanggung masyarakat berpendapatan rendah. Hasil negatif ini dapat dijelaskan oleh mekanisme *Phillips Curve* dan *income compression hypothesis*, yang berargumen bahwa inflasi moderat dapat meningkatkan pendapatan nominal terutama pada kelompok pekerja, sehingga mempersempit gap pendapatan ketika upah menyesuaikan lebih cepat dibanding profit kapitalis. Dalam konteks ASEAN, inflasi mungkin mendorong penyesuaian upah minimum, penyaluran bantuan sosial, atau ekspansi ekonomi sektor informal yang diikuti peningkatan pendapatan kalangan menengah ke bawah. Temuan signifikan ini menunjukkan bahwa inflasi dalam rentang moderat dapat justru

berdampak redistributive (Ndou, 2024; Suratman, 2022; Ullah et al., 2022). Selain itu kemungkinan terjadinya inflasi moderat yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerjaterutama di sektor informal dan padat karya serta menaikkan upah nominal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kunawotor et al., 2020; Wairooy & Slamet Haryono, 2023) hasilnya menunjukkan bahwa hubungan positif hanya terjadi jika melebihi tingkat ambang batas tingkat inflasi.

Pengaruh Variabel CPI dalam memoderasi hubungan GDP, FDI, Pengangguran dan Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil MRA menunjukkan pola moderasi yang menarik terkait peran tata kelola pemerintahan terhadap hubungan variabel makroekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pertama, temuan bahwa CPI memoderasi hubungan GDP terhadap ketimpangan pendapatan sejalan dengan *institutional theory* yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi baru memberikan manfaat yang merata ketika didukung oleh tata kelola yang baik. Ketika korupsi rendah, distribusi manfaat pertumbuhan lebih inklusif sehingga GDP lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, temuan ini menguatkan argumen Kuznets bahwa negara pada tahap pertumbuhan lanjutan memerlukan perbaikan institusi agar dapat memasuki fase penurunan ketimpangan.

Kedua, moderasi signifikan pada hubungan inflasi–ketimpangan menunjukkan bahwa tata kelola berperan penting dalam memastikan inflasi tidak memperburuk ketimpangan. Dalam konteks ASEAN, negara dengan CPI tinggi umumnya memiliki mekanisme kebijakan yang mampu meredam dampak negatif inflasi terhadap kelompok rentan melalui kebijakan subsidi, penyesuaian upah, dan kontrol harga. Hal ini menjelaskan mengapa inflasi yang moderat dan dikendalikan dapat berdampak redistributif pada negara dengan tata kelola yang baik, ketidakhadiran moderasi CPI pada hubungan FDI dan pengangguran menunjukkan bahwa tata kelola di negara-negara ASEAN belum cukup kuat untuk mengarahkan arus investasi asing maupun dinamika pasar tenaga kerja menuju perbaikan distribusi pendapatan. Dalam konteks ini, kualitas institusi belum mampu memastikan bahwa FDI benar-benar berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang inklusif atau pemerataan pendapatan. Dengan demikian, peningkatan CPI belum tentu berdampak pada pola hubungan FDI dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan.

Nilai R-square sebesar 0.4649 menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan sekitar 46% variasi ketimpangan pendapatan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis MRA, dapat disimpulkan bahwa Corruption Perception Index (CPI) memiliki peran penting sebagai variabel moderasi dalam model ketimpangan pendapatan di negara-negara ASEAN. CPI terbukti memoderasi secara signifikan hubungan antara GDP dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan. CPI sebagai pure moderator memperkuat pengaruh negatif GDP dan inflasi terhadap ketimpangan, menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Sebaliknya, CPI tidak memoderasi hubungan FDI dan pengangguran terhadap ketimpangan, yang mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola belum cukup kuat untuk mempengaruhi distribusi manfaat investasi asing maupun dinamika pasar tenaga kerja. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi institusi, peningkatan transparansi, serta penguatan kualitas tata kelola untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata di negara-negara ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. H., Mohamed, A. A., Mohamed, A. A., & Mohamed, A. A. (2025). Do globalization, foreign direct investment, and inflation drive income inequality? Evidence from Somalia within the Kuznets curve hypothesis. *Research in Globalization*, 11, 100301. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resglo.2025.100301>
- Anugrah, R., Mandai, S., & Erza, O. (2025). *Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan Akibat Pengeluaran Pemerintah Daerah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, Inflasi, Jumlah Penduduk Di Jawa Barat Pada Tahun 2016-2022*. 5(2), 1017–1024. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/Jet.V5i2.19183>
- Belay, A. (2022). *Determinants of Income Inequality in Ethiopia*. X(2), 178–200.
- Hu, R. (2021). *Inflation and income inequality in an open economy*.
- Gam, T. T. H., Oanh, D. L. K., & Dang, N. M. B. (2023). The impact of foreign direct investment on income inequality in developing countries: The Bayesian approach. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(1), 127–143. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i1.18164>
- Kunawotor, M. E., Bokpin, G. A., & Barnor, C. (2020). Drivers of income inequality in Africa: Does institutional quality matter? *African Development Review*, 32(4), 718–729. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-8268.12473>
- Kundu, D. (2024). *Building A Fairer Future : Joint Actions For Poverty , Hunger And Inequality Reduction By G20 Nations*.
- Kuznets, S. (1995). Economic growth and the environment. *Quarterly Journal of Economics*, 110(2), 353–377. <https://doi.org/10.2307/2118443>
- Muslikhah, A. S., & Utami, E. D. (2019). *Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2012-2017*. 2017, 738–748.
- Ndou, E. (2024). Inflation-income inequality nexus in South Africa : the role of inflationary environment. *Journal of Applied Economics*, 27(1). <https://doi.org/10.1080/15140326.2024.2316968>
- Nguyen, V. B. (2023). The role of digitalization in the FDI – income inequality relationship in developed and developing countries. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 28(55), 6–26. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-09-2021-0189>
- Ramadhanty, F., Wasiaturrehman, W., & Makatutu, A. I. A. (2024). The Effect of Foreign Direct Investment and Inflation on The Economic Growth of ASEAN Countries 2009-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 9(1), 91–108. <https://doi.org/10.20473/jiet.v9i1.57259>
- Ravinthirakumaran, K., & Ravinthirakumaran, N. (2018). The Impact Of Foreign Direct Investment On Income Inequality: A Panel Autogressive Distributed Lag Approach For The Asia-Pacific Economic Cooperation Developing Economies. In *Asia-Pacific Sustainable Development Journal* (Vol. 25, Issue 1).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development*. Pearson Addison Wesley. https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C
- Sapriyadi, Nurhuda, Syukri, M., & Ekawaty, C. (2024). *Sumber daya keuangan internasional dan ketimpangan pendapatan di indonesia I*. 7, 213–221.
- Şenol, N. (2023). *Ekonomik Büyüme , İşsizlik Ve Gelir Eşitsizliği : Brics - T Ülkeleri Örneği I Economic Growth , Unemployment , And Income Inequality : The Case Of Brics - T Countries*. 8(2), 359–363. <https://doi.org/10.29106/Fesa.1229052>
- Suratman, E. (2022). *Impact Of Inflation And Exchange Rate On Asean Income Inequality*.

23(1), 390–403.

- Ullah, I., Tunio, F. H., Ullah, Z., & Nabi, A. A. (2022). *The Impact of Capital Account Openness on Income Inequality: Empirical Evidence from Asia*. 9(2), 49–59. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no2.0049>
- Wairooy, F. A., & Slamet Haryono. (2023). Pengaruh Foreign Direct Investment, Inflasi, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Corruption Perception Index sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(1 Juni), 37–50. <https://doi.org/10.14421/jmes.2023.021-03>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika : Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews* (Edisi keli). UPP STIM YKPN.
- Zandi, G. (2022). *Do Corruption , Inflation and Unemployment Influence the Income Inequality of Developing Asian Countries ?* 14(2), 118–128. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i2.688>